

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADI

Kantor Jakarta:

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340

Telp. (021) 3903021-22 Fax. (021) 3903024 E-mail: pp.muh.jkt@gmail.com

Web site: http://www.muhammadiyah.or.id

Kantor Yogyakarta: Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 553132 Fax. (0274) 553137

Email: muhammadiyahpusat@vahoo.com



Nomor: 31\ /1.0/F/2017

Lamp

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pengantar

Jakarta, 26 Ramadhan 1438 H

21 Juni

2017 M

Kepada Yth.

- 1. PW Muhammadiyah Se Indonesia
- 2. PD Muhammadiyah Se Indonesia
- 3. Amal Usaha Muhammadiyah se Indonesia

di -

Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Ba'da salam, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat wal'afiat sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan lancar. Aamiin.

Bersama ini kami kirimkan Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017".

Kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Amal Usaha Muhammadiyah agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat pernyataan tersebut di lingkungan internal Persyarikatan, dan kepada pihak-pihak terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor,

Zaenuddin, S.Ag. M.Pd.

Tembusan:

- 1. PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta
- 2. Arsip



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta: Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340

Telp. (021) 3903021-22. Fax. (021) 3903024 E-mail: pp.muh.jkt@gmail.com

Web site: http://www.muhammadiyah.or.id

Kantor Yogyakarta : Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 553132 Fax. (0274) 553137

Email: muhammadiyahpusat@yahoo.com



PERNYATAAN SIKAP PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Tentang

PERATURAN MENTERI PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. NOMOR 23 TAHUN 2017

Nomor: 305/PER/I.0/A/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa Pendidkan Karakter merupakan komitmen dan kebijakan politik Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Agenda penguatan Pendidkan Karakter agar tidak berhenti pada dataran normatif harus disertai dan diimplementasikan dengan kebijakan yang tersistem untuk mewujudkannya, antara lain melalui kebijakan Lima Hari Sekolah sebagaimana Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Melalui Pendidkan Karakter yang memiliki dimensi atau muatan Pendidkan keagamaan, religiusitas, moral, kreatifitas, pengembangan minat, dan berbagai hal yang arahnya pada penguatan Karakter subjek didik yang sifatnya menyeluruh dan bukan satu dimensi; maka diharapkan terjadi dinamisasi pembangunan insan Indonesia seutuhnya yang unggul dan berkemajuan sebagaimana hal tersebut dipahami betul oleh Mendikbud sehingga diimplementasikan kedalam Permendikbud. Selain itu dengan kebijakan Mendikbud tersebut akan berdampak positif bagi penguatan pola asuh dan kelekatan sosial di institusi keluarga dan pengembangan sosial-budaya masyarakat di luar institusi Pendidkan formal.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan dan sikap sebagaimana pokok pikirannya telah disampaikan ke publik pada tanggal 19 Juni 2017 di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai berikut:

- 1. Berkaitan dengan kebijakan Mendikbud yang mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pendidkan Karakter melalui lima hari sekolah maka PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil. Kami yakin Mendikbud Prof Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan Pendidkan Karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli Pendidkan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya didunia Pendidkan luas, sehingga berada dijalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.
- 2. Berharap agar Presiden memberikan penguatan, *memback-up*, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan Pendidkan Karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan. Jika dirujuk pada Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden.

- 3. Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, bukan sebaliknya untuk mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.
- 4. Kebijakan Pendidkan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan Pendidkan Karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya kebijakan yang telah diambil oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi Pendidkan nasional menghadapi era persaingan global.

Demikian pernyataan dan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan karunia-Nya di bulan Ramadhan ini. Nashrun min Allah wa Fathun Qarib.

Surakarta, 24 Ramadhan 1438 H. 19 Juni 2017 M.

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545.549 Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM 750.178